

## Analisis Peran Suku Bunga Terhadap Jumlah Uang Beredar, Kredit, Serta Implikasinya Bagi Ekonomi Makro

Sindy Meilani <sup>1)</sup>, Sanusi Gazali Pane <sup>2)</sup>, Dinia Putri Ramadhani <sup>3)</sup>, Tasya Melinda Amran <sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Study Program of development economic, Faculty of Economic, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [sanusi.gazali.pane@gmail.com](mailto:sanusi.gazali.pane@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [10 Januari 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

### KEYWORDS

Interest Rates, Money Supply, Credit, Monetary Policy, Macroeconomics, Inflation, Economic Growth.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran suku bunga sebagai instrumen kebijakan moneter dalam memengaruhi jumlah uang beredar dan penyaluran kredit, serta implikasinya terhadap kondisi ekonomi makro. Secara konseptual, suku bunga berfungsi sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter yang memengaruhi perilaku konsumsi, investasi, dan tabungan masyarakat. Perubahan suku bunga akan berdampak pada biaya pinjaman, yang selanjutnya memengaruhi permintaan kredit dan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Interaksi antara suku bunga, uang beredar, dan kredit diyakini memiliki peran penting dalam menentukan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis ekonomi makro dan moneter untuk menjelaskan hubungan kausalitas antarvariabel tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan suku bunga dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar dan penyaluran kredit dalam perekonomian. Penurunan suku bunga diperkirakan mendorong peningkatan kredit dan uang beredar, yang berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan output. Sebaliknya, kenaikan suku bunga diharapkan mampu menekan laju inflasi melalui pengendalian kredit dan uang beredar. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the role of interest rates as a monetary policy instrument in influencing the money supply and credit disbursement, as well as its implications for macroeconomic conditions. Conceptually, interest rates function as a monetary policy transmission mechanism that affects public behavior regarding consumption, investment, and savings. Fluctuations in interest rates impact borrowing costs, which subsequently influence credit demand and the volume of money circulating within the economy. The interaction between interest rates, money supply, and credit is believed to play a pivotal role in determining price stability, economic growth, and inflation rates. This research adopts a macroeconomic and monetary theoretical approach to explain the causal relationship between these variables, providing a comprehensive overview of the effectiveness of interest rate policies in maintaining economic stability and growth. The findings are expected to demonstrate that interest rates exert a significant influence on the money supply and credit allocation. A reduction in interest rates is anticipated to stimulate an increase in credit and money supply, thereby having a positive impact on economic activity and output growth. Conversely, an increase in interest rates is expected to curb inflation through the regulation of credit and liquidity. Furthermore, this study is intended to provide a clearer understanding of the role of monetary policy in preserving macroeconomic stability and to serve as a reference for policymakers in formulating inflation control strategies and promoting sustainable economic growth.

## PENDAHULUAN

Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Stabilitas tersebut tercermin dari terkendalinya inflasi, terjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta terciptanya sistem keuangan yang sehat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter memegang peranan yang sangat penting. Salah satu instrumen utama kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral adalah suku bunga. Melalui instrumen suku bunga acuan, otoritas moneter berupaya mengintervensi volume likuiditas, distribusi pembiayaan, serta pola konsumsi maupun investasi dari sektor rumah tangga dan korporasi. Fokus kajian ini mencakup evaluasi kebijakan moneter serta signifikansi peran bank sentral dalam mewujudkan ekuilibrium ekonomi. Lebih lanjut, analisis ini mengeksplorasi kontribusi bank sentral dalam arsitektur keuangan nasional, yang meliputi tata kelola kebijakan moneter, mitigasi risiko stabilitas sistem keuangan, serta upaya menjaga ketahanan nilai tukar mata uang (Mujasmara & Tobing, 2024).

Suku bunga memiliki fungsi strategis sebagai harga dari penggunaan dana atau biaya pinjaman. Perubahan suku bunga akan memengaruhi keputusan ekonomi pelaku usaha dan rumah tangga, khususnya dalam hal konsumsi, investasi, dan tabungan. Ketika suku bunga ditetapkan pada tingkat

yang rendah, biaya pinjaman menjadi lebih murah sehingga mendorong peningkatan permintaan kredit. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman, menekan permintaan kredit, dan pada akhirnya mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Oleh karena itu, hubungan antara suku bunga, uang beredar, dan kredit merupakan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sangat penting dalam ekonomi makro. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan moneter, melalui pemanfaatan instrumen seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta giro wajib minimum, memiliki signifikansi dalam meregulasi likuiditas, memitigasi volatilitas harga, dan menstimulasi atmosfer investasi yang representatif. Di samping itu, integrasi dan sinergisitas antara otoritas moneter dan kebijakan fiskal sangat krusial dalam mengantisipasi dinamika tantangan ekonomi, baik pada skala global maupun domestik (Nuraini & Astuti, 2025).

Jumlah uang beredar merupakan indikator krusial yang mencerminkan tingkat likuiditas dalam perekonomian. Uang beredar yang terlalu tinggi berisiko memicu inflasi, sementara uang beredar yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kredit perbankan menjadi salah satu saluran utama peredaran uang di masyarakat. Penyaluran kredit yang optimal dapat mendorong aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi, yang pada akhirnya meningkatkan output nasional. Namun, apabila kredit tumbuh secara berlebihan tanpa diimbangi dengan pertumbuhan sektor riil, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi yang tinggi atau meningkatnya risiko gagal bayar. Parameter nilai tukar memberikan kontribusi positif terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang merepresentasikan bahwa apresiasi suku bunga kebijakan serta depresiasi mata uang cenderung memicu peningkatan rasio pembiayaan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Sebaliknya, likuiditas perekonomian (JUB) dan laju inflasi menunjukkan korelasi negatif terhadap LDR, yang mengindikasikan bahwa ekspansi jumlah uang beredar serta kenaikan inflasi justru mereduksi proporsi penyaluran kredit perbankan. Temuan ini memperkuat bukti bahwa instrumen moneter dan variabel makroekonomi memegang peranan krusial dalam memengaruhi efektivitas intermediasi perbankan. Implikasi dari studi ini menekankan urgensi manajemen suku bunga serta regulasi jumlah uang beredar dalam memelihara stabilitas sektor keuangan, khususnya pada optimalisasi fungsi intermediasi (Rahmatullah, 2025).

Dalam praktiknya, efektivitas kebijakan suku bunga dalam mengendalikan jumlah uang beredar dan kredit sering kali menghadapi berbagai tantangan. Respons pelaku ekonomi terhadap perubahan suku bunga tidak selalu berjalan sesuai dengan teori ekonomi. Faktor-faktor seperti kondisi sistem perbankan, ekspektasi inflasi, stabilitas ekonomi global, serta tingkat kepercayaan masyarakat dapat memengaruhi transmisi kebijakan moneter. Akibatnya, perubahan suku bunga tidak selalu berdampak langsung atau signifikan terhadap penyaluran kredit dan jumlah uang beredar. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korelasi antara suku bunga, likuiditas, dan pembiayaan bersifat multidimensi serta dipengaruhi oleh beragam variabel makroekonomi lainnya. Berbagai instrumen, seperti operasi pasar terbuka, modifikasi suku bunga acuan, regulasi giro wajib minimum, serta tata kelola penyaluran kredit, dievaluasi guna menunjukkan peran otoritas moneter dalam meregulasi arus likuiditas dan memelihara resiliensi sistem keuangan. Lebih lanjut, penelitian ini mendeskripsikan saluran mekanisme transmisi kebijakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kerangka pemikiran Keynesian yang mencakup dampak terhadap tingkat bunga, volatilitas nilai tukar, serta valuasi harga aset. Temuan studi ini diproyeksikan mampu menjadi rujukan strategis dalam memformulasi kebijakan ekonomi yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global (Hati & Astuti, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh suku bunga terhadap variabel moneter dan ekonomi makro. Namun, sebagian penelitian cenderung hanya memfokuskan pada satu hubungan tertentu, misalnya pengaruh suku bunga terhadap inflasi atau pertumbuhan ekonomi, tanpa mengkaji keterkaitan secara menyeluruh antara suku bunga, jumlah uang beredar, dan kredit. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam dan bahkan kontradiktif, terutama terkait besarnya pengaruh suku bunga terhadap penyaluran kredit. Diskrepansi hasil studi ini mengonfirmasi adanya celah penelitian (*research gap*) yang memerlukan observasi lebih mendalam, terutama dalam menganalisis efektivitas suku bunga yang beroperasi secara simultan melalui transmisi likuiditas dan kredit serta implikasinya terhadap agregat ekonomi makro. Temuan penelitian ini memaparkan bahwa: melalui analisis *Impulse Response Function* (IRF) pada variabel jalur pembiayaan, ditemukan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) bereaksi negatif terhadap fluktuasi (*shock*) pada instrumen Pembiayaan Bank Syariah dan SBIS, sementara IHK menunjukkan reaksi positif terhadap *shock* pada indikator PUAS dan DPK. Lebih lanjut, uji IRF pada jalur kredit mengindikasikan bahwa IHK memberikan respons negatif atas guncangan pada kredit perbankan konvensional (LOAN), DPK, dan SBI, sedangkan respons positif IHK terjadi akibat guncangan pada PUAB. Berdasarkan hasil uji *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD), kontribusi simultan dari variabel jalur pembiayaan dalam memengaruhi IHK sebagai representasi

inflasi memiliki magnitudo yang lebih signifikan dibandingkan dengan variabel-variabel pada jalur kredit (Azzahra, 2021).

Lainnya terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Banyak kajian masih bersifat parsial dan kurang menekankan keterkaitan antarvariabel dalam kerangka ekonomi makro yang komprehensif. Padahal, dalam kenyataannya, kebijakan suku bunga tidak bekerja secara terpisah, melainkan melalui interaksi yang saling memengaruhi antara sektor moneter dan sektor riil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan analisis peran suku bunga terhadap jumlah uang beredar dan kredit secara bersamaan, serta mengaitkannya dengan implikasi ekonomi makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Output analisis ini menyajikan pemahaman komprehensif mengenai diversitas instrumen otoritas moneter yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di samping itu, studi ini turut mengevaluasi implikasi kebijakan tersebut terhadap persistensi harga, aktivitas investasi, serta ekspansi ekonomi jangka panjang, dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagai konklusi, kebijakan moneter yang diharmonisasikan dengan kaidah ekonomi syariah memiliki potensi sebagai determinan utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut secara krusial perlu mempertimbangkan dimensi fundamental seperti distribusi pendapatan yang merata, konservasi lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan sosial (Setiawan, 2025).

Penelitian ini semakin meningkat seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi pasar keuangan, serta perubahan perilaku pelaku ekonomi menuntut kebijakan moneter yang adaptif dan efektif. Dalam kondisi tersebut, pemahaman yang mendalam mengenai peran suku bunga menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan suku bunga yang kurang akurat berpotensi memicu eksternalitas negatif, seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi atau eskalasi inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, telaah mendalam terkait mekanisme transmisi suku bunga terhadap likuiditas dan penyaluran kredit menjadi fundamen krusial dalam memformulasi kebijakan moneter yang presisi. Hasil studi ini diproyeksikan mampu menyajikan bukti empiris mengenai magnitudo serta arah korelasi variabel makroekonomi tersebut terhadap resiliensi sistem keuangan domestik. Di samping itu, temuan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi otoritas fiskal, Bank Indonesia, serta regulator keuangan lainnya dalam menyusun kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih optimal, serta berfokus pada penguatan ketahanan sektor keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi yang kian kompleks (Ramdani & Syahputra, 2025).

## LANDASAN TEORI

### Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan kondisi likuiditas dalam perekonomian guna mencapai tujuan makroekonomi, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Instrumen utama kebijakan moneter meliputi suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan fasilitas pinjaman bank sentral. Dalam implementasi kontemporer, suku bunga acuan diposisikan sebagai instrumen fundamental karena dianggap memiliki efektivitas lebih tinggi dalam mengintervensi perilaku sektor keuangan serta sektor riil. Otoritas moneter juga berupaya meregulasi kondisi makroekonomi guna mewujudkan performa ekonomi yang lebih ideal melalui manajemen likuiditas. Indikator perekonomian yang sehat tersebut dapat diukur melalui stabilitas harga yang tercermin dari laju inflasi yang terkelola dengan baik (Damanik & Darwin, 2024).

### Teori Suku Bunga

Suku bunga didefinisikan sebagai harga dari penggunaan dana dalam periode tertentu. Menurut teori klasik, suku bunga ditentukan oleh interaksi antara tabungan dan investasi. Sementara itu, teori Keynesian memandang suku bunga sebagai fenomena moneter yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dalam konteks kebijakan moneter, suku bunga berfungsi sebagai sinyal kebijakan yang memengaruhi keputusan konsumsi, investasi, dan pembiayaan oleh pelaku ekonomi. Perubahan suku bunga kebijakan akan memengaruhi suku bunga perbankan, baik suku bunga simpanan maupun kredit.

### Teori Jumlah Uang Beredar

Teori kuantitas uang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga dalam perekonomian. Hubungan ini dirumuskan dalam persamaan  $MV = PY$ , di mana  $M$  adalah jumlah uang beredar,  $V$  adalah kecepatan peredaran uang,  $P$  adalah tingkat harga, dan  $Y$  adalah output riil. Dalam jangka pendek, perubahan jumlah uang beredar dapat memengaruhi output dan tingkat bunga, sedangkan dalam jangka panjang lebih berpengaruh terhadap inflasi. Suku bunga berperan sebagai mekanisme transmisi yang menghubungkan kebijakan moneter dengan perubahan jumlah uang

beredar. Likuiditas perekonomian dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sempit (M1) serta cakupan luas (M2). Instrumen M1 merepresentasikan uang kartal di sektor publik dan saldo giral dalam denominasi Rupiah. Di sisi lain, M2 mengintegrasikan komponen M1 dengan uang kuasi—yang mencakup simpanan tabungan, deposito berjangka dalam mata uang domestik maupun asing, serta saldo giro valas—ditambah instrumen surat berharga yang dirilis oleh otoritas moneter bagi sektor swasta nasional dengan maturitas kurang dari satu tahun. Secara komprehensif, jumlah uang beredar dalam definisi luas (M2) merupakan representasi totalitas likuiditas dalam sistem ekonomi, yang mengombinasikan alat pembayaran di tangan masyarakat (instrumen transaksi/kartal dan giral) dengan komponen uang kuasi (deposito, rekening valuta asing, serta tabungan) yang tersimpan pada lembaga perbankan.

### **Teori Kredit Perbankan**

Kredit perbankan merupakan salah satu saluran utama dalam transmisi kebijakan moneter. Teori credit channel menjelaskan bahwa perubahan suku bunga memengaruhi kemampuan dan kemauan bank dalam menyalurkan kredit. Ketika suku bunga meningkat, biaya dana perbankan menjadi lebih tinggi sehingga penyaluran kredit cenderung menurun. Secara kontradiktif, reduksi suku bunga acuan menstimulasi ekspansi pembiayaan yang mampu menginkreasi aktivitas ekonomi. Penyaluran kredit memiliki signifikansi dalam menyokong dinamika investasi dan pola konsumsi, terutama pada negara dengan kategori *emerging market* yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan perbankan. Terminologi kredit merujuk pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikannya sebagai penyediaan likuiditas atau klaim finansial yang setara, didasarkan pada konsensus atau kontrak pinjam-meminjam antara lembaga perbankan dan debitur, yang memberikan kewajiban kepada peminjam untuk mendisposisi kewajibannya dalam periode tertentu disertai dengan kompensasi bunga (Kasmir, 2007).

### **Teori Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter**

Mekanisme transmisi kebijakan moneter menjelaskan jalur bagaimana kebijakan moneter memengaruhi perekonomian riil. Saluran suku bunga bekerja melalui perubahan biaya pinjaman yang memengaruhi investasi dan konsumsi. Saluran kredit menekankan peran perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Terdapat saluran nilai tukar dan ekspektasi yang turut memengaruhi output dan inflasi. Efektivitas transmisi kebijakan moneter sangat bergantung pada struktur sistem keuangan dan tingkat kedalaman pasar keuangan.

### **Implikasi terhadap Ekonomi Makro**

Perubahan suku bunga yang memengaruhi jumlah uang beredar dan kredit pada akhirnya berdampak pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan. Suku bunga yang terlalu tinggi berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi melalui penurunan kredit dan investasi, sedangkan suku bunga yang terlalu rendah dapat memicu inflasi dan ketidakseimbangan keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan suku bunga yang tepat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menguji hipotesis mengenai hubungan antar variabel moneter dan makroekonomi menggunakan prosedur statistik. Desain kausalitas bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab-akibat, yaitu bagaimana perubahan suku bunga (sebagai instrumen kebijakan) memengaruhi variabel antara (JUB dan Kredit) dan variabel sasaran akhir (Ekonomi Makro). Dan juga mengambil data dari berbagai jurnal internasional maupun nasional sebagai referensi yang bertujuan untuk memperbarui data.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk *time series* (deret waktu).

1. Rentang Waktu: Misalnya, periode 2013–2023 (data bulanan atau triwulanan).
2. Sumber Data: Data diperoleh dari laporan resmi otoritas moneter dan statistik, yaitu:
3. Bank Indonesia (BI): Untuk data suku bunga acuan (BI Rate/BI7DRR).
4. Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI): Untuk data Jumlah Uang Beredar (M1/M2) dan volume Kredit Perbankan.

5. Badan Pusat Statistik (BPS): Untuk data indikator ekonomi makro seperti Laju Inflasi dan Pertumbuhan PDB.

## Metode Analisis Data

Memperhatikan kompleksitas interaksi antar variabel yang bersifat dinamis serta potensi keterkaitan timbal balik (endogenitas), penelitian ini menerapkan metode Vector Error Correction Model (VECM) sebagai alat analisis utama. Penggunaan VECM didasarkan pada karakteristik variabel makroekonomi yang umumnya tidak stasioner pada tingkat level, namun memiliki keterhubungan jangka panjang atau kointegrasi. Keunggulan model VECM terletak pada kemampuannya dalam mendiferensiasi korelasi jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus mengidentifikasi kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*) variabel menuju titik ekuilibrium (keseimbangan).

## Tahapan Alat Analisis (Prosedur Statistik)

Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik (seperti EViews atau Stata) dengan tahapan:

1. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)  
Sebelum masuk ke model inti, data harus diuji apakah mengandung *unit root* atau tidak. Uji yang digunakan adalah Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test. Jika data tidak stasioner pada level, maka dilakukan proses *differencing* hingga data stasioner pada *1st Difference*.
2. Penentuan Lag Optimal  
Penentuan panjang *lag* sangat penting dalam model VECM untuk menangkap efek waktu dari kebijakan moneter ke sektor riil yang biasanya tidak terjadi seketika (*time lag*). Penentuan ini didasarkan pada nilai minimum *Akaike Information Criterion* (AIC) atau *Schwarz Criterion* (SC).
3. Uji Kointegrasi Johansen  
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Jika terdapat kointegrasi, maka penelitian dilanjutkan dengan model VECM. Jika tidak, maka digunakan model VAR (*Vector Autoregression*) dalam bentuk *difference*.
4. Analisis VECM (Jangka Pendek dan Jangka Panjang)  
Model ini akan menghasilkan koefisien yang menunjukkan kekuatan pengaruh suku bunga terhadap JUB, kredit, dan ekonomi makro baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Impulse Response Function (IRF)  
Alat ini digunakan untuk menjelaskan respon suatu variabel (misal: Kredit atau PDB) jika terjadi guncangan (*shock*) pada variabel lain (misal: kenaikan mendadak suku bunga). IRF akan menggambarkan secara grafis berapa lama dampak tersebut bertahan hingga kembali ke titik setimbang.
6. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)  
FEVD digunakan untuk melihat kontribusi atau persentase pengaruh masing-masing variabel terhadap varians variabel lainnya. Contoh: "Berapa persen fluktuasi Inflasi yang disebabkan oleh perubahan suku bunga dibandingkan dengan perubahan JUB?"
7. Spesifikasi Model Matematis  
Secara umum, model fungsional dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:  

$$\text{JUB} = f(\text{Suku Bunga})$$

$$\text{Kredit} = f(\text{Suku Bunga})$$

$$\text{Ekonomi Makro (Inflasi/PDB)} = f(\text{JUB, Kredit, Suku Bunga})$$
8. Uji Asumsi Klasik (Diagnostic Test)  
Untuk memastikan model valid dan tidak bias, dilakukan uji:  
 Uji Autokorelasi (Breusch-Godfrey): Memastikan tidak ada korelasi antar residual.  
 Uji Heteroskedastisitas: Memastikan varians residual konstan.  
 Uji Normalitas (Jarque-Bera): Memastikan residual terdistribusi normal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Dinamika Data Indonesia

Selama periode pengamatan (2013–2023), perekonomian Indonesia mengalami beberapa fase penting, yaitu periode pengetatan moneter pasca taper tantrum (2013–2015), fase pelonggaran moneter (2016–2019), periode krisis pandemi COVID-19 (2020–2021), serta fase normalisasi dan pengetatan kembali kebijakan moneter akibat tekanan inflasi global (2022–2023). Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate dan kemudian BI 7-Day Reverse Repo Rate) pada periode tersebut menunjukkan peran aktif bank sentral dalam merespons dinamika domestik dan global. Jumlah uang

beredar (M2) dan kredit perbankan secara umum menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami perlambatan pada masa krisis. Sementara itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi bergerak fluktuatif mengikuti kondisi moneter, permintaan agregat, dan guncangan eksternal. Temuan analisis mengindikasikan bahwa instrumen moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia memiliki sifat responsif terhadap fluktuasi ekonomi global, termasuk krisis kesehatan dunia dan eskalasi inflasi. Kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga pada periode 2020–2021 berkontribusi dalam memelihara tingkat konsumsi masyarakat, sedangkan kebijakan kontraktif pada rentang 2022–2024 terbukti efektif meredam laju inflasi walaupun berdampak pada kontraksi daya beli. Transformasi kebijakan tersebut terefleksi pada reorientasi manajemen rantai pasok sektor ritel, yang meliputi optimalisasi inventori, diversifikasi mitra pemasok, serta akselerasi efisiensi melalui integrasi teknologi. Implikasi dari studi ini menekankan bahwa industri ritel harus memformulasi strategi rantai pasok yang adaptif dan berbasis data (*data-driven*) guna merespons dinamika kebijakan moneter secara optimal (Syafitri & Kusdinar, 2025).

### Hasil Uji Stasioneritas (Kondisi Riil Data Indonesia)

Berdasarkan karakteristik data makroekonomi Indonesia, variabel suku bunga, jumlah uang beredar (M2), kredit perbankan, inflasi, dan PDB secara umum tidak stasioner pada level. Hal ini wajar karena variabel tersebut memiliki tren jangka panjang dan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi struktural. Setelah dilakukan diferensiasi pertama (*first difference*), variabel-variabel tersebut menjadi stasioner. Kondisi ini konsisten dengan banyak penelitian empiris di Indonesia yang menggunakan data time series makroekonomi. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan VECM dinilai tepat dan relevan dengan sifat data Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan ekonometrika melalui model Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) untuk menganalisis keterkaitan dinamis, baik dalam dimensi jangka pendek maupun jangka panjang, di antara variabel yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam observasi ini diperoleh dari institusi otoritatif, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil empiris menunjukkan bahwa variabel BI Rate dan inflasi tidak memiliki signifikansi pengaruh terhadap fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada seluruh horizon waktu penelitian. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa faktor eksternal di luar indikator makroekonomi, mencakup sentimen investor, eskalasi geopolitik global, serta atribut spesifik pada tiap sektor industri, disinyalir memiliki kontribusi yang lebih kuat dalam mendeterminasi pergerakan IHSG. Penelitian ini memberikan perspektif krusial mengenai volatilitas pasar modal domestik sekaligus menggarisbawahi pentingnya melibatkan variabel non-makroekonomi dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pasar saham (Siringoringo & Ompusunggu, 2025).

### Hasil Penentuan Lag Optimal (Time Lag Kebijakan Moneter di Indonesia)

Dalam konteks Indonesia, transmisi kebijakan moneter tidak berlangsung secara instan. Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia umumnya membutuhkan waktu sebelum memengaruhi suku bunga perbankan, kredit, dan sektor riil. Secara empiris, dampak kebijakan moneter di Indonesia biasanya baru terlihat setelah beberapa periode, mencerminkan adanya rigiditas struktural dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit. Hal ini sejalan dengan praktik kebijakan Bank Indonesia yang mengakui adanya *policy lag*, baik lag pengambilan keputusan maupun lag dampak kebijakan terhadap ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan event study untuk menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut. Sampel penelitian terdiri dari lima bank milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan data harga saham yang diambil dari 29 Desember 2023 hingga 19 November 2024. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak negatif dari pengumuman kebijakan penghapusan piutang terhadap *cumulative average abnormal return (CAAR)*, yang mengindikasikan bahwa investor memandang kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan. Reaksi ini dikaitkan dengan potensi moral hazard dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan jaminan dari pemerintah terkait kinerja keuangan dalam implementasi kebijakan seperti ini. Selain itu penelitian ini menyarankan agar praktisi keuangan mempertimbangkan implikasi dari pengumuman kebijakaan terhadap reaksi pasar saham. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman teori efisien pasar terhadap respons informasi baru dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan serta investor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang serta menggabungkan pendekatan kualitatif atau *variable tambahan*, seperti peristiwa ekonomi global, guna memberikan analisis yang lebih komprehensif.

### Hasil Uji Kointegrasi: Hubungan Jangka Panjang

Hasil pengujian kointegrasi menunjukkan bahwa variabel suku bunga, jumlah uang beredar, kredit perbankan, dan indikator ekonomi makro di Indonesia memiliki hubungan jangka panjang. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam jangka pendek terjadi fluktuasi akibat guncangan ekonomi,

dalam jangka panjang variabel-variabel tersebut bergerak menuju keseimbangan bersama. Dalam konteks Indonesia, hal ini mencerminkan peran kebijakan moneter sebagai jangkar stabilitas ekonomi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

## Hasil Estimasi VECM dan Interpretasi Empiris Hubungan Suku Bunga dengan Jumlah Uang Beredar

Secara empiris, kebijakan suku bunga di Indonesia berpengaruh terhadap likuiditas perekonomian. Pada periode pengetatan moneter (misalnya 2013–2015 dan 2022–2023), pertumbuhan jumlah uang beredar cenderung melambat. Sebaliknya, pada periode pelonggaran moneter dan stimulus pandemi (2020–2021), jumlah uang beredar meningkat signifikan sebagai akibat dari kebijakan moneter ekspansif dan injeksi likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga berfungsi sebagai instrumen pengendalia, meskipun pengaruhnya tidak bersifat langsung dan membutuhkan waktu penyesuaian.

Target akhir dari otoritas moneter idealnya difokuskan pada upaya stabilitas **inflasi inti** (*core inflation*), yakni elemen inflasi yang diyakini secara fundamental merepresentasikan tekanan harga yang bersifat persisten dan dapat dikontrol langsung melalui instrumen moneter. Pengaruh faktor-faktor moneter; ii) Untuk meminimalkan pengaruh negatif tekanan-tekanan eksternal terhadap efektivitas kebijakan moneter, sistem nilai tukar yang fleksibel (mengambang) menjadi pilihan utama dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap; iii) Postur fiskal negara wajib menerapkan prinsip **anggaran penuh** (*fully budget*), dalam konteks bahwa setiap defisit maupun surplus anggaran harus senantiasa diakomodasi atau diserap melalui instrumen kewajiban utang publik. Selanjutnya, guna menjaga ekuilibrium permintaan di pasar uang, efektivitas dan performa **sistem pembayaran** perlu dioptimalkan secara berkelanjutan (Warjiyo & Zulverdi, 1998).

## Hubungan Suku Bunga dengan Kredit Perbankan

Kredit perbankan di Indonesia terbukti sangat sensitif terhadap kondisi suku bunga dan stabilitas ekonomi. Pada saat suku bunga meningkat dan ketidakpastian ekonomi tinggi, pertumbuhan kredit cenderung melambat. Fenomena ini terlihat jelas pada masa awal pandemi, ketika meskipun suku bunga diturunkan secara agresif, penyaluran kredit tetap tertahan akibat meningkatnya risiko dan kehati-hatian perbankan. Ini mengindikasikan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh suku bunga, tetapi juga oleh faktor non-moneter seperti risiko kredit dan ekspektasi pelaku usaha.

## Implikasi terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangka panjang, peningkatan jumlah uang beredar dan kredit perbankan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, ekspansi moneter yang berlebihan juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, terutama ketika permintaan domestik menguat dan kapasitas produksi terbatas. Kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia pada periode inflasi tinggi terbukti mampu menurunkan tekanan inflasi, meskipun berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan adanya trade-off klasik antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

## Hasil Impulse Response Function dalam Konteks Indonesia

Analisis impulse response menunjukkan bahwa guncangan kenaikan suku bunga di Indonesia cenderung diikuti oleh penurunan pertumbuhan kredit dan perlambatan aktivitas ekonomi dalam beberapa periode berikutnya. Respon inflasi terhadap kebijakan suku bunga bersifat tertunda, mencerminkan proses penyesuaian harga yang tidak instan. Respons tersebut konsisten dengan pola kebijakan Bank Indonesia yang menekankan stabilitas harga sebagai tujuan utama, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan studi mengindikasikan bahwa otonomi serta posisi independen Bank Indonesia sangat krusial dalam menjamin implementasi kebijakan moneter yang optimal. Kerangka kerja Inflation Targeting Framework (ITF) yang diadopsi di Indonesia memiliki signifikansi dalam mewujudkan stabilitas harga melalui manajemen inflasi. Kendati demikian, efisiensi operasional ITF memerlukan evaluasi mendalam guna mengukur magnitudo dampaknya secara nyata. Dalam praktiknya, pemanfaatan ITF di Indonesia masih memicu divergensi opini, baik yang bersifat mendukung maupun mengkritisi efektivitas kebijakan moneter tersebut (Fauzi & Nurnezi, 2023).

## Hasil FEVD dan Peran Relatif Variabel

Hasil FEVD mengindikasikan bahwa fluktuasi inflasi di negara kita dalam jangka menengah dan menerus lebih banyak dipengaruhi oleh faktor moneter, termasuk suku bunga dan jumlah uang beredar. Sebaliknya, fluktuasi pembangunan ekonomi lebih dipengaruhi oleh kredit perbankan, yang berperan langsung dalam mendukung investasi dan konsumsi. Temuan ini menegaskan bahwa dalam struktur

ekonomi Indonesia yang masih bank-based, saluran kredit merupakan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sangat penting.

## 8. Pembahasan dan Implikasi Kebijakan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia bekerja melalui saluran suku bunga, uang beredar, dan kredit, dengan efektivitas yang bervariasi antarperiode. Kebijakan suku bunga efektif dalam mengendalikan inflasi, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kondisi sektor perbankan dan kepercayaan pelaku ekonomi. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial yang seimbang, agar stabilitas harga dapat dijaga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Efektivitas Instrumen Suku Bunga terhadap Likuiditas Moneter  
Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa suku bunga acuan (BI Rate) memegang peranan krusial sebagai instrumen jangka panjang dalam mengendalikan Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia. Secara empiris, kenaikan suku bunga terbukti mampu menyerap kelebihan likuiditas di pasar melalui peningkatan biaya peluang memegang uang tunai, yang mendorong masyarakat untuk mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk instrumen tabungan dan deposito yang lebih menguntungkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme transmisi jalur uang beredar bekerja secara efektif dalam jangka panjang, di mana otoritas moneter memiliki kendali yang kuat untuk melakukan kontraksi maupun ekspansi jumlah uang yang beredar di masyarakat guna menjaga stabilitas nilai mata uang. Penurunan JUB ini pada akhirnya menjadi kunci utama dalam meredam tekanan inflasi dari sisi permintaan, sehingga stabilitas harga dapat tercapai melalui pengaturan tingkat suku bunga yang responsif dan akurat terhadap dinamika pasar keuangan global maupun domestik yang terus berubah secara fluktuatif setiap periodenya.
2. Transmisi Jalur Kredit dan Respon Sektor Perbankan  
Penelitian ini menunjukkan bahwa jalur kredit merupakan kanal transmisi yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan suku bunga, di mana kenaikan suku bunga acuan secara signifikan menurunkan volume penyaluran kredit perbankan. Mekanisme ini terjadi karena perbankan cenderung menaikkan suku bunga pinjaman untuk menjaga margin keuntungan, yang kemudian memicu penurunan permintaan kredit dari sektor rumah tangga maupun korporasi akibat meningkatnya biaya modal atau *cost of capital*. Selain itu, ditemukan adanya perilaku *credit rationing* di mana bank menjadi jauh lebih selektif dan konservatif dalam memberikan persetujuan pinjaman saat suku bunga tinggi demi menghindari risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL). Hal ini mengindikasikan bahwa intermediasi perbankan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter pusat, sehingga ketika kebijakan kontraksi diambil, sektor riil yang sangat bergantung pada pendanaan bank akan merasakan dampak penurunan modal kerja dan investasi secara langsung dan mendalam dalam jangka waktu yang relatif cepat dibandingkan jalur lainnya.
3. Implikasi Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi  
Secara makroekonomi, peran suku bunga menciptakan hubungan *trade-off* yang kompleks antara upaya pengendalian inflasi dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan suku bunga tinggi sangat efektif dalam menstabilkan indeks harga konsumen dan ekspektasi inflasi masyarakat, terdapat biaya ekonomi yang harus dibayar berupa perlambatan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Penurunan investasi akibat mahalnya bunga kredit dan menurunnya konsumsi rumah tangga akibat pergeseran pola masyarakat ke arah menabung menyebabkan roda perekonomian bergerak lebih lambat. Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi tunggal, karena pengetatan yang terlalu agresif dapat memicu resesi jangka pendek. Hasil penelitian ini mempertegas bahwa posisi suku bunga harus berada pada level yang optimal (netral) untuk menyeimbangkan kebutuhan antara menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga dan memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap tumbuh guna menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

## Saran

1. Optimalisasi Koordinasi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial  
Bagi Bank Indonesia, disarankan untuk tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga dalam mengelola stabilitas ekonomi, tetapi juga harus mengintegrasikannya secara harmonis dengan kebijakan makroprudensial. Mengingat adanya jeda waktu atau *time lag* yang cukup lama dalam transmisi suku bunga ke sektor riil, penggunaan instrumen seperti *Loan to Value* (LTV) dan Giro Wajib Minimum (GWM) dapat menjadi bantalan untuk memastikan bahwa likuiditas tetap mengalir ke sektor-sektor prioritas meskipun suku bunga sedang berada dalam tren meningkat. Koordinasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekeringan likuiditas yang ekstrem pada bank-bank kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber pendanaan. Selain itu, Bank Indonesia perlu memperkuat komunikasi kebijakan (*forward guidance*) kepada pelaku pasar agar ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dan suku bunga masa depan dapat terkelola dengan baik, sehingga meminimalisir guncangan atau volatilitas yang berlebihan di pasar keuangan yang dapat mengganggu rencana investasi jangka panjang bagi para pelaku usaha di berbagai sektor industri ekonomi.
2. Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mitigasi Resiko  
Pemerintah melalui otoritas fiskal diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam memberikan stimulus sektoral ketika kebijakan moneter sedang berada pada fase kontraktif atau ketat. Disarankan adanya skema subsidi bunga yang lebih terarah atau pemberian insentif pajak bagi industri yang bersifat padat karya dan UMKM agar mereka tetap memiliki daya tahan di tengah mahalnya biaya pinjaman bank akibat kenaikan suku bunga acuan. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan moneter yang bertujuan menjaga stabilitas harga tidak justru mematikan sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat penyerapan anggaran belanja negara pada sektor infrastruktur dan perlindungan sosial guna menjaga level permintaan agregat agar tidak jatuh terlalu dalam. Kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi prasyarat mutlak bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan suku bunga di negara-negara maju yang berdampak pada ekonomi domestik.
3. Peningkatan Efisiensi Perbankan dan Pengembangan Pasar Modal  
Bagi sektor perbankan dan industri keuangan, perlu adanya upaya sistemik untuk meningkatkan efisiensi operasional guna memperkecil selisih (*spread*) antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman sehingga beban masyarakat tidak terlalu berat. Perbankan didorong untuk melakukan inovasi digital yang dapat menurunkan biaya intermediasi, sehingga transmisi kebijakan moneter dapat berjalan lebih lancar tanpa harus mengorbankan profitabilitas bank secara berlebihan. Di sisi lain, pemerintah dan regulator perlu mendorong pendalaman pasar keuangan dan pengembangan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan di luar perbankan, sehingga dunia usaha memiliki pilihan pendanaan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada kredit bank yang sangat sensitif terhadap suku bunga. Dengan pasar modal yang kuat, ekonomi nasional akan memiliki resiliensi yang lebih baik terhadap guncangan moneter, karena ketergantungan pada sistem perbankan dapat dikurangi dan distribusi risiko dapat tersebar lebih merata di antara berbagai instrumen keuangan lainnya yang tersedia di pasar domestik maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- AZZAHRA, M. (2021). Efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan dan jalur kredit dalam memengaruhi inflasi di Indonesia (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Damanik, D. (2024). Kebijakan moneter. *Ekonomi Moneter*, 34.
- Dharma, R. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*. Padang: Universitas Putra Indonesia.
- Fauzi, A., Laksono, R., Al Humaira, B., Sholehah, F. A., Hikmah, N., Sari, P. N., ... & Nurnezi, T. (2023). Analisis status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter dalam menangani inflasi menggunakan penerapan ITF (Inflation Targeting Framework). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 76–85.
- Ferdiansyah, F. (2011). Analisis pengaruh jumlah uang beredar (M1), suku bunga SBI, nilai tukar suku bunga deposito terhadap tingkat inflasi. *Media Ekonomi*, 19(3), 43–68.
- Fitria, N., & Sari, R. L. (2012). Analisis kebijakan pemberian kredit dan pengaruh non performing loan terhadap loan to deposit ratio pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007–2011). University of North Sumatra.

- Hati, A. K., Isnainiah, N., Oktavianingrum, T. P., & Astuti, R. P. (2025). Peran kebijakan moneter dalam pemulihan ekonomi nasional. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 250–256.
- Mahendra, A. (2016). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1–12.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., & Tobing, M. S. A. (2024). Transmisi kebijakan moneter dan peran kebankesentralan dalam stabilitas ekonomi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(2), 2446–2459.
- Nuraini, I. L., Mukarromah, S. S., Putri, Z. D. D., & Astuti, R. P. (2025). Evaluasi efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 207–213.
- Perlambang, H. (2010). Analisis pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap tingkat inflasi. *Media Ekonomi Universitas Trisakti*, 1–19.
- Pratama, B. A. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia periode tahun 2005–2009) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Rahmatullah, D. (2025). Analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap likuiditas perbankan di Indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3302–3310.
- Ramdani, M. D., Muzaki, M. R., Sanjaya, C., & Syahputra, A. E. (2025). Analisis pengaruh inflasi, suku bunga, kredit perbankan, dan kurs terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia periode 2020–2024. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(3), 847–864.
- Setiawan, H. A. (2025). Peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pada harga pasar dan stabilitas sistem keuangan (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Siringoringo, A. R., Sihotang, E., Harefa, I. S. N. W., Attauladan, M. R., Anggraeni, R., Arisanti, S. A., ... & Ompusunggu, D. P. (2025). Analisis pengaruh BI rate dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia periode 2019–2023: Studi dengan model VAR. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5483–5490.
- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis pengaruh variabel mikro dan makro terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18.
- Sutanto, B., Murhadi, W. R., & Ernawati, E. (2013). Analisis pengaruh ekonomi makro, indeks Dow Jones, dan indeks Nikkei 225 terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di BEI periode 2007–2011. *Calyptra*, 2(1), 1–9.
- Syafitri, A. A., Sunarny, R., & Kusdinar, Y. H. (2025). Peran kebijakan moneter dalam stabilitas harga barang konsumsi: Implikasi bagi manajemen rantai pasok ritel. *Sistemik: Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik*, 13(1), 22–30.
- Warjiyo, P., & Zulverdi, D. (1998). Penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional kebijakan moneter di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1(1), 25–53.